

PENGARUH PENGGUNAAN E-KTP TERHADAP PENDAFTARAN TANAH YANG BERSIFAT GANDA

Indra Pradana¹⁾, Apriola Dwi Indra Swary²⁾, Erga Eka Putri³⁾, Jihan Salsabila⁴⁾, Naila Seifana⁵⁾, Sri Anisa Pujawati⁶⁾
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence

Email: indrap55@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 3 Februari 2024

Accepted: 14 Februari 2024

Published: 15 Februari 2024

ABSTRAK

Kebutuhan tanah terus meningkat sementara persediaan tanah sangat terbatas, memegang peran kunci dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Keadilan terhadap distribusi tanah penting untuk kepastian hukum tanah, yang mencerminkan keputusan berdasarkan standar objektif. Distribusi tanah memainkan peran krusial dalam konsolidasi tanah dan sektor pertanian. Pendaftaran hak atas tanah membutuhkan kepastian hukum yang diidentifikasi dalam berbagai aspek sebagai subyek hukum. Pembatasan kepemilikan lahan adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan pertahanan. Absensi pemilik tanah dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penegasan administrasi identitas pemilik tanah melalui Kartu Tanda Penduduk menjadi penting, memastikan satu tanah sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk. Administrasi kependudukan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memberikan landasan hukum untuk dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif untuk mengusulkan perubahan dalam kerangka hukum, dengan fokus pada sinkronisasi data kependudukan digital dan data pertanahan untuk mencegah penyalahgunaan data identitas dan memastikan kepemilikan tanah secara komprehensif.

Kata Kunci : E-KTP, Tanah, Sinergitas Data, Administrasi Kependudukan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The need for land continues to increase while the supply of land is very limited, playing a key role in food security and people's welfare. Fairness in land distribution is important for the legal certainty of land, reflecting decisions based on objective standards. Land distribution plays a crucial role in the consolidation of land and the agricultural sector. Registration of land rights requires legal certainty identified in various aspects as legal subjects. Restrictions on land tenure are key to creating justice and defense. The absence of landowners can pose challenges to natural resource management. Administrative affirmation of the identity of the landowner through the identity card is important, ensuring that one land matches the identity on the identity card. The population administration, in accordance with Law Number 24 of 2013, provides a legal basis for residence documents, such as identity cards. This study uses normative research methods to propose changes in the legal framework, focusing on synchronizing digital population data and land data to prevent misuse of identity data and ensure comprehensive land ownership.

Keywords: E-KTP, Land, Data Synergy, Population Administration, Legal Certainty

A. Pendahuluan

Kebutuhan tanah terus meningkat sementara persediaan tanah sangat terbatas. Tanah berperan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan suatu negara.¹Tanah juga berperan menunjang kesejahteraan rakyat dalam rangka kelangsungan hidup dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.² Negara harus hadir menciptakan keadilan atas tanah sebagaimana filosofi yang terkandung dalam Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

¹ Moreda, T. (2022). Beyond land rights registration: understanding the mundane elements of land conflict in Ethiopia. *Journal of Peasant Studies*. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2120813>

² Aditya, T., Santosa, P. B., Yulaikhah, Y., Widjajanti, N., Atunggal, D., & Sulistyawati, M. (2021). Validation and collaborative mapping to accelerate quality assurance of land registration. *Land Use Policy*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689>

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA. Kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah menjadi subjek penting dalam hukum.³

Keadilan terhadap distribusi tanah berpengaruh terhadap kepastian hukum tanah. Keadilan mengartikan bahwa suatu keputusan dapat bertindak berdasarkan standar objektif.⁴ Distribusi tanah penting dalam proyek konsolidasi tanah dimana sektor pertanian dialokasikan kembali ke bidang tanah yang telah ditentukan.⁵ Kepastian hukum bagi pendaftaran hak atas tanah diidentifikasi dalam berbagai aspek sebagai subyek hukum.⁶

Berdasarkan pasal 2 UUPA 1960 negara sebagai tingkatan tertinggi untuk menguasai hak atas tanah, mendapat wewenang berdasarkan undang-undang untuk mencapai keadilan terhadap pertanahan yang ada di Indonesia. Negara harus membatasi kepemilikan lahan untuk menciptakan keadilan dan pertahanan.⁷ Meningkatnya absensi juga dapat menimbulkan tantangan bagi lembaga yang ingin mengelola sumber daya alam.⁸

Penegasan administrasi terhadap identitas pemilik lahan atau tanah. Dalam kepemilikan tanah perlu adanya penegasan administrasi kependudukan dalam kepemilikan lahan tanah.⁹ Kepemilikan kartu tanda penduduk hanya memperbolehkan memiliki satu tanah yang berada sesuai dengan identitas yang ada di Kartu Tanda Penduduk.¹⁰ Hubungan ini membutuhkan data yang komprehensif mengenai lokasi bidang tanah, serta cara menghubungkan bidang tanah tersebut dengan lokasi pemilik lahan tertentu.¹¹

Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.¹² Dokumen Kependudukan adalah dokumen atau kartu

³ Pretty, J., Attwood, S., Bawden, R., van den Berg, H., Bharucha, Z. P., Dixon, J., Flora, C. B., Gallagher, K., Genskow, K., Hartley, S. E., Ketelaar, J. W., Kiara, J. K., Kumar, V., Lu, Y., MacMillan, T., Maréchal, A., Morales-Abubakar, A. L., Noble, A., Vara Prasad, P. V., ... Yang, P. (2020). Assessment of the growth in social groups for sustainable agriculture and land management. *Global Sustainability*, 3. <https://doi.org/10.1017/sus.2020.19>

⁴ Liu, H., Soares-Filho, B. S., Leite-Filho, A. T., Zhang, S., Du, J., & Yi, Y. (2023). How to balance land demand conflicts to guarantee sustainable land development. *IScience*, 26(5). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106641>

⁵ Lee, K. (2019). Absentee ownership, land taxation and surcharge. *Annals of Regional Science*, 62(1), 47–68. <https://doi.org/10.1007/s00168-018-0880-7>

⁶ Joireman, S. F., & Tchatchoua-Djomo, R. (2023). Post-conflict restitution of customary land: Guidelines and trajectories of change. *World Development*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106272>

⁷ Sorice, M. G., Rajala, K., & Kreuter, U. P. (2018). Understanding Management Decisions of Absentee Landowners: More Than Just Presence-Absence. *Rangeland Ecology and Management*, 71(2), 159–162. <https://doi.org/10.1016/j.rama.2017.12.002>

⁸ Gallemore, C., Munroe, D., & van Berkel, D. (2018). Rural-to-urban migration and the geography of absentee non-industrial private forest ownership: A case from southeast Ohio. *Applied Geography*, 96, 141–152. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.05.010>

⁹ Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Subarudi, Alviya, I., & Muttaqin, M. Z. (2019). Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest Policy and Economics*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>

¹⁰ Burton, E. (2019). Navigating global socialism: Tanzanian students in and beyond East Germany. *Cold War History*, 19(1), 63–83. <https://doi.org/10.1080/14682745.2018.1485146>

¹¹ Upadhyaya, C. (2021). Recasting Land: Agrarian Urbanism in Amaravati. *Urbanisation*, 6(1), 82–103. <https://doi.org/10.1177/24557471211018304>

¹² Korkea-aho, E., & Leino-Sandberg, P. (2022). Law, Legal Expertise and EU Policy-Making: Introduction. In *Law, Legal Expertise and EU Policy-Making* (pp. 1–16). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108909099.001>

resmi yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang dalam hukum.¹³ Kartu Tanda Penduduk atau bisa disebut kartu administrasi yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹⁴

Meski ada larangan di Indonesia kepemilikan tanah secara ganda yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964, namun dalam praktik penguasaan tanah menjadi problem, karena sering kali identitas kependudukan ganda atau administrasi kependudukan yang tidak ketat.¹⁵ Pemilik tanah seringkali tertutup atau tidak terhubung dari daerah tempat tanah tersebut.¹⁶ Dalam pembuatan akta tanah sering lalai dalam pemeriksaan identitas.¹⁷ Kepemilikan tanah absentee sulit dibuktikan karena dilakukan dengan melalui cara penggunaan identitas orang lain.¹⁸

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan doktrin hukum. Langkah awal dengan merumuskan pertanyaan kritis terkait bidang hukum pertanahan kemudian meninjau dari ekstensif terhadap literatur hukum dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dengan sumber-sumber hukum yang kemudian membangun argumentasi normative yang bertujuan untuk mengusulkan perubahan terhadap kerangka hukum yang di dukung terhadap pertimbangan etika dan filosofis.

Focus penelitian ini menawarkan sinkronisasi data kependudukan digital dengan data pertanahan. Kependudukan digital bermanfaat mencegah penyalahgunaan data identitas seseorang.¹⁹ Data pertanahan adalah data yang diperoleh dari hasil pendaftaran tanah. Program pendaftaran tanah meliputi survey, pemetaan dan sertifikasi batas-batas bidang tanah.²⁰ Program ini memastikan kepemilikan tanah di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten secara keseluruhan.²¹

B. Hasil Penelitian

Politik hukum pertanahan yang menciptakan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan retribusi pertanahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konsepsi politik hukum pertanahan diwujudkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kepemilikan lahan

¹³ Sunjo, E., & Page, B. (2022). Land Restitution and Conflict in Cameroon: The case of the Bakweri. *African Affairs*, 121(485), 623–648. <https://doi.org/10.1093/afraf/adac034>

¹⁴ Liu, J., & Shi, W. (2021). A cross-boundary travel tale: Unraveling Hong Kong residents' mobility pattern in Shenzhen by using metro smart card data. *Applied Geography*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102416>

¹⁵ Hermann Kam et al., “Engaging Absentee Landholders in Ecosystem Service Delivery in South-Eastern Australia,” *Ecosystem Services* 39 (October 1, 2019), <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100988>.

¹⁶ Amina Maharjan et al., “Understanding Rural Outmigration and Agricultural Land Use Change in the Gandaki Basin, Nepal,” *Applied Geography* 124 (November 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102278>.

¹⁷ Md Azmeary Ferdoush, “Flexible Land: The State and Its Citizens' Negotiation over Land Ownership,” *Geoforum* 130 (March 1, 2022): 46–58, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.02.003>.

¹⁸ Stephanie A. Snyder et al., “Relationships between Absenteeism, Conservation Group Membership, and Land Management among Family Forest Owners,” *Land Use Policy* 91 (February 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104407>.

¹⁹ Ayesha Ali, Agha Ali Raza, and Ihsan Ayyub Qazi, “Validated Digital Literacy Measures for Populations with Low Levels of Internet Experiences,” *Development Engineering* 8 (November 1, 2023), <https://doi.org/10.1016/j.deveng.2023.100107>.

²⁰ Trias Aditya et al., “Validation and Collaborative Mapping to Accelerate Quality Assurance of Land Registration,” *Land Use Policy* 109 (October 1, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689>.

²¹ S. Krishnapriya and Greeshma Sarath, “Securing Land Registration Using Blockchain,” in *Procedia Computer Science*, vol. 171 (Elsevier B.V., 2020), 1708–15, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.183>.

bertentangan nilai-nilai Pancasila karena berdampak terhadap ketimpangan dan rasa keadilan bagi masyarakat setempat.

Ujud politik hukum larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembelian ganti kerugian sebagai turunan dari UUPA, yang pada prinsipnya melarang kepemilikan tanah pertanian diluar kecamatan domisili tanah setempat termasuk larang kepemilikan tanah hak milik melebihi batas tertentu. Namun dalam implementasinya kebijakan hukum larangan tanah absentee di Indonesia masih terkendala peraturan yang lebih teknis, misalnya bagaimana prosedur penegakan hukum, lembaga yang berwenang mencabut hak, proses ganti rugi dan pendistribusian tanah yang dinyatakan absentee. Untuk mengujudkan politik hukum terhadap larangan pemerintah harus menyiapkan beberapa regulasi dan lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan penegakan hukum tanah absentee.

Kebijakan hukum larang absentee pada implementasinya pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tingkat Kabupaten/Kota disikapi secara personal bergantung daerah masing-masing. Beberapa Kantor ATR/BPN melakukan penyaringan dengan memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai data seseorang memenuhi syarat atau tidak untuk memohonkan hak katas tanah. Meskipun kurun waktu sebelum tahun 2009 KTP di Indonesia masih secara manual diterbitkan oleh beberapa lembaga dari mulai oleh camat, Dinas catatan sipil pada tingkat pemerintah Daerah. Dampak penerbitan KTP secara manual berdampak terhadap kepemilikan KTP ganda yang berpotensi seseorang memohonkan hak sesuai KTP tetapi tidak sesuai dengan domisili sebenarnya karena alasan memiliki KTP lebih dari satu. Realitas penggunaan KTP ganda telah pula menumpukkan deretan penguasaan tanah pertanian secara absentee yang dirasakan telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

E- KTP berbasis data Nasional yang telah diterapkan di Indonesia seharusnya dapat menjadi solusi preventif dengan melakukan penjaringan dan penyaringan pemohon hal atas tanah pertanian secara absentee. Perlu integrasi data kependudukan dengan instansi pertanahan dan pihak terkait guna melakukan pencegahan kepemilikan suatu lahan.

C. Pembahasan

1. Administrasi Kependudukan Digital sebagai solusi dalam pencegahan kepemilikan Tanah Ganda

Sinergi data administrasi kependudukan dapat membantu pihak Badan Pertanahan Nasional mencegah kepemilikan ganda pada saat pendaftaran tanah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi administrasi kependudukan pemilik tanah dapat memverifikasi identitas dengan lebih efektif dan menghindari potensi kecurangan.²² Melalui sinergi data administrasi kependudukan, pihak Badan Pertanahan Nasional dapat mengakses informasi yang lengkap tentang penduduk, termasuk data personal dan riwayat kepemilikan tanah. Melalui administrasi kependudukan digital dapat mendeteksi adanya duplikasi kepemilikan tanah atau kepemilikan ganda yang dilakukan secara illegal.²³ Dalam administrasi kependudukan digital juga

²² Corbelle-Rico, E., Sánchez-Fernández, P., López-Iglesias, E., Lago-Peñas, S., & Da-Rocha, J. M. (2022). Putting land to work: An evaluation of the economic effects of recultivating abandoned farmland. *Land Use Policy*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105808>

²³ Gobster, P. H., Rigolon, A., Hadavi, S., & Stewart, W. P. (2020). The condition-care scale: A practical approach to monitoring progress in vacant lot stewardship programs. *Landscape and Urban Planning*, 203. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103885>

mengurangi kemungkinan kepemilikan tanah oleh individu yang tidak berhak atau kepemilikan fiktif yang dapat merugikan pihak lain.²⁴

Perlu adanya penguatan peraturan dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan lembaga pertanahan. Penguatan peraturan harus memastikan bahwa lembaga administrasi kependudukan memiliki kerangka kerja yang jelas dan mekanisme yang terdefinisi dengan baik untuk melakukan sinkronisasi data.²⁵ Pedoman sinkronisasi data kependudukan yaitu tentang bagaimana data akan diintegrasikan, apa yang akan disinkronisasi, dan bagaimana pembaruan data akan diterapkan secara berkala.²⁶ Peraturan penguatan sinkronisasi harus memberikan panduan tentang penyusunan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan data.²⁷

Pemerintah harus menjamin perlindungan data elektronik guna keamanan data masyarakat. Pemerintah harus menyadari pentingnya perlindungan data elektronik karena semakin banyaknya informasi pribadi bersifat sensitif yang disimpan secara digital.²⁸ Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan data elektronik dengan menetapkan standar keamanan dan penyimpanan data.²⁹ Pemerintah dapat membangun kepercayaan publik, menjaga keamanan data masyarakat, dan membuat lingkungan digital aman bagi orang-orang dengan menerapkan perlindungan data elektronik.³⁰

2. **KTP Elektronik (Identity Card) untuk kepentingan transaksi pelayanan pemerintah dan keamanan data pribadi guna mencegah kepemilikan tanah ganda.**

Pemanfaatan Identity Card untuk transaksi layanan pemerintah dan pentingnya memperhatikan keamanan data pribadi. Pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk mengumpulkan data dan menerapkan sistem biometrik dalam skema kartu identitas nasional.³¹ Masalah keamanan data seperti penyusupan informasi pribadi dapat membahayakan privasi

²⁴ van Oosterom, P., Unger, E. M., & Lemmen, C. (2022). The second themed article collection on the land administration domain model (LADM). *Land Use Policy*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106287>

²⁵ Studzinska, J. (2022). Request for information as an auxiliary measure in intellectual property litigation concerning electronic works and the protection of personal data. *Procedia Computer Science*, 207, 4276–4287. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.491>

²⁶ Park, S., Akatyev, N., Jang, Y., Hwang, J., Kim, D., Yu, W., Shin, H., Han, C., & Kim, J. (2018). A comparative study on data protection legislations and government standards to implement digital forensic readiness as mandatory requirement. *DFRWS 2018 EU - Proceedings of the 5th Annual DFRWS Europe*, S93–S100. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2018.01.012>

²⁷ Olivero, M. A., Bertolino, A., Domínguez-Mayo, F. J., Escalona, M. J., & Matteucci, I. (2020). Digital persona portrayal: Identifying pluridentity vulnerabilities in digital life. *Journal of Information Security and Applications*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102492>

²⁸ Rennuit-Mortensen, A. W., Dalgas Rasmussen, K., & Grahn, M. (2023). How replacing fossil fuels with electrofuels could influence the demand for renewable energy and land area. *Smart Energy*, 10, 100107. <https://doi.org/10.1016/j.segy.2023.100107>

²⁹ Xu, Z., Luo, M., Peng, C., & Feng, Q. (2023). Sanitizable signature scheme with privacy protection for electronic medical data sharing. *Cyber Security and Applications*, 1, 100018. <https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100018>

³⁰ Ali, A., Raza, A. A., & Qazi, I. A. (2023). Validated digital literacy measures for populations with low levels of internet experiences. *Development Engineering*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.deveng.2023.100107>

³¹ Kit Yeng Iong and Jenny O.L. Phillips, “The Transformation of Government Employees’ Behavioural Intention towards the Adoption of E-Government Services: An Empirical Study,” *Social Sciences and Humanities Open* 7, no. 1 (January 1, 2023), <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100485>.

data.³² Keamanan data pribadi dapat dieksploitasi jika data dan keamanannya tidak dikelola secara efektif.³³

Perlu perlindungan data elektronik dari sifat sensitive. Beberapa data yg lebih bersifat sensitif harus dilindungi secara khusus, seperti data faktual umum seperti nama dan tanggal lahir.³⁴ Menjaga sejumlah besar data yang sensitif dalam berbagai bentuk merupakan salah satu tantangan.³⁵ Kesalahan perlindungan data sedikit saja dapat mengakibatkan kerugian yg fatal.³⁶ Penyalahgunaan akses data adalah dimana pemrosesan data pribadi melanggar batasan atau tidak sesuai dengan tujuan penggunaan data sebagaimana ditentukan oleh subjek data.³⁷

Risiko penggunaan Identity Card dan kerentanan Identity Card yang digunakan akibat server yang tidak memadai. Risiko pencurian identitas dikaitkan dengan pelanggaran data pemerintah/perusahaan dan pengalaman menjadi korban kejahatan lainnya.³⁸ Pemerintah merancang sistem deteksi kerentanan kerentanan privasi kode dan identitas.³⁹ Panas server yang berlebihan dan tidak terhapus menyebabkan perlambatan dan kegagalan server.⁴⁰

Perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum data pribadi akan berdampak kepatuhan dan akuntabilitas pegawai pemerintah dalam mengelola Identity Card. Perlindungan data pribadi adalah salah satu masalah aktual dari institusi perlindungan informasi di dunia saat ini.⁴¹ Perlindungan data pribadi harus mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan peraturan hukum tentang aspek positif dari berbagai teknologi.⁴² Akuntabilitas didefinisikan sebagian besar dengan memasukkan dan menekankan konsep pertanggungjawaban.⁴³ Dari perspektif perlindungan data, skenario akses penegakan hukum belum tentu diperhitungkan dengan baik.⁴⁴ Perlindungan data telah mengeluarkan pedoman yang menentang penggunaan kembali data untuk tujuan penegakan hukum.⁴⁵

³² Iong and Phillips.

³³ Iong and Phillips.

³⁴ Yuanxin Li and Darina Saxunová, "A Perspective on Categorizing Personal and Sensitive Data and the Analysis of Practical Protection Regulations," in *Procedia Computer Science*, vol. 170 (Elsevier B.V., 2020), 1110–15, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.060>.

³⁵ Li and Saxunová.

³⁶ Zhiyan Xu et al., "Sanitizable Signature Scheme with Privacy Protection for Electronic Medical Data Sharing," *Cyber Security and Applications* 1 (December 2023): 100018, <https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100018>.

³⁷ L. Genga, Nicola Zannone, and Anna Squicciarini, "Discovering Reliable Evidence of Data Misuse by Exploiting Rule Redundancy," *Computers and Security* 87 (November 1, 2019), <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101577>.

³⁸ David Burnes, Marguerite DeLiema, and Lynn Langton, "Risk and Protective Factors of Identity Theft Victimization in the United States," *Preventive Medicine Reports* 17 (March 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101058>.

³⁹ Jitao Wang et al., "ConGradetect: Blockchain-Based Detection of Code and Identity Privacy Vulnerabilities in Crowdsourcing," *Journal of Systems Architecture* 114 (March 1, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2020.101910>.

⁴⁰ A. M. Abbas et al., "Effect of Data Center Servers' Power Density on the Decision of Using in-Row Cooling or Perimeter Cooling," *Alexandria Engineering Journal* 60, no. 4 (August 1, 2021): 3855–67, <https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.02.051>.

⁴¹ Abbas et al.

⁴² Abbas et al.

⁴³ Rachana Rajan and Stephanie M. Topp, "Accountability Mechanisms of Inquiries and Investigations into Australian Governments' Responses to the COVID-19 Pandemic," *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 46, no. 4 (August 1, 2022): 488–94, <https://doi.org/10.1111/1753-6405.13258>.

⁴⁴ Rajan and Topp.

⁴⁵ Stephen Molldrem, Mustafa I. Hussain, and Alexander McClelland, "Alternatives to Sharing COVID-19 Data with Law Enforcement: Recommendations for Stakeholders," *Health Policy* 125, no. 2 (February 1, 2021): 135–40, <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.10.015>.

3. Peran Administrasi Kependudukan dalam Integrasi data lahan

Administrasi kependudukan dapat berperan dalam mengelola kepemilikan tanah. Administrasi kependudukan dapat mengumpulkan informasi terkait pemilik lahan melalui pembaruan data penduduk.⁴⁶ Administrasi kependudukan dapat bekerja sama dengan badan pertanahan dan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kepemilikan lahan.⁴⁷ Informasi administrasi kependudukan memberikan pelayanan administratif terkait kepemilikan lahan, seperti perubahan alamat atau pembaruan data kepemilikan.⁴⁸

Identifikasi dan pencatatan kepemilikan lahan dapat mempengaruhi kepastian hukum hak atas tanah. Identifikasi kepemilikan lahan merupakan proses yang penting dalam pengelolaan tanah.⁴⁹ Kepemilikan lahan melibatkan pencarian informasi dan verifikasi status kepemilikan tanah secara lahan.⁵⁰ Keberadaan pemilik lahan dapat menciptakan ketidakjelasan dalam hal tanggung jawab dan hak kepemilikan.⁵¹ Ketidakjelasan terhadap pertanggung jawaban mempengaruhi berbagai aspek hukum, termasuk perjanjian sewa, dan sengketa kepemilikan.⁵² Kepastian hukum tanah merupakan landasan penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak atas tanah.⁵³

Integrasi data lahan merupakan proses penggabungan informasi mengenai kepemilikan tanah. Integrasi merupakan proses penggabungan informasi tentang kepemilikan tanah oleh individu.⁵⁴ Penggabungan informasi data, pemerintah terkait dapat mengoptimalkan penggunaan dan mewujudkan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah.⁵⁵ Integrasi melibatkan pengumpulan dan pemeliharaan informasi yang terkait dengan pemilik lahan dalam

⁴⁶ Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>

⁴⁷ Li, Z., Follman, K., Freshwater, E., Engler, F., & Yel, L. (2022). Integrated population pharmacokinetics of immunoglobulin G following intravenous or subcutaneous administration of various immunoglobulin products in patients with primary immunodeficiencies. *International Immunopharmacology*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.109331>

⁴⁸ Okembo, C., Lemmen, C., Kuria, D., & Zevenbergen, J. (2022). Developing an adapted land administration domain model profile for Kenya. *Land Use Policy*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106087>

⁴⁹ Parra, D., & Mauger, R. (2022). A new dawn for energy storage: An interdisciplinary legal and techno-economic analysis of the new EU legal framework. *Energy Policy*, 171. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113262>

⁵⁰ de Zwart, P., & Soekhradj, P. (2023). Sweet equality: Sugar, property rights, and land distribution in colonial Java. *Explorations in Economic History*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2023.101513>

⁵¹ Moreda, T. (2022). Beyond land rights registration: understanding the mundane elements of land conflict in Ethiopia. *Journal of Peasant Studies*. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2120813>

⁵² Restrepo, G. U., Pritchard, B., & Welch, E. (2023). Does the extent of time in drought affect the rate of farm ownership change in a local government area? A sixteen-year assessment of rural land ownership change in New South Wales, Australia. *Journal of Rural Studies*, 98, 11–18. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.020>

⁵³ Gaffar, S., Karsona, A. M., Pujiwati, Y., & Perwira, I. (2021). The concept of procedural law regarding the implementation of collective agreements with legal certainty in termination of employment in Indonesia. *Heliyon*, 7(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06690>

⁵⁴ Yan, J., Van Son, R., & Soon, K. H. (2021). From underground utility survey to land administration: An underground utility 3D data model. *Land Use Policy*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105267>

⁵⁵ Debonne, N., van Vliet, J., Metternicht, G., & Verburg, P. (2021). Agency shifts in agricultural land governance and their implications for land degradation neutrality. *Global Environmental Change*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102221>

satu basis data yang terpadu.⁵⁶ Kepemilikan lahan merujuk pada situasi di mana individu memiliki kepemilikan atas suatu tanah, tetapi tidak tinggal atau berada di tempat tinggal tersebut secara aktif.⁵⁷

D. Kesimpulan

Tertib administrasi kependudukan melalui E-KTP dapat mencegah permohonan pendaftaran tanah pertamakali dan pemeliharaan data tanah secara *absentee*. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menolak pemohon apabila domisili pemohon diluar domisili tanah berada. Namun pada kenyataannya masih ditemukan kepemilikan tanah *absentee* dengan cara melakukan penyeludupan hukum misalnya, menggunakan orang lain sebagai pemohon hak atas tanah sehingga pemilik sesungguhnya berbeda dengan pemohon hak. Keadaan tersebut sesungguhnya dapat dicegah dengan melibatkan peran pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Abbas et al., “Effect of Data Center Servers’ Power Density on the Decision of Using in-Row Cooling or Perimeter Cooling,” *Alexandria Engineering Journal* 60, no. 4 (August 1, 2021): 3855–67, <https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.02.051>.
- Aditya, T., Santosa, P. B., Yulaikhah, Y., Widjajanti, N., Atunggal, D., & Sulistyawati, M. (2021). Validation and collaborative mapping to accelerate quality assurance of land registration. *Land Use Policy*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689>
- Ali, A., Raza, A. A., & Qazi, I. A. (2023). Validated digital literacy measures for populations with low levels of internet experiences. *Development Engineering*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.deveng.2023.100107>
- Amina Maharjan et al., “Understanding Rural Outmigration and Agricultural Land Use Change in the Gandaki Basin, Nepal,” *Applied Geography* 124 (November 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102278>.
- Ayesha Ali, Agha Ali Raza, and Ihsan Ayyub Qazi, “Validated Digital Literacy Measures for Populations with Low Levels of Internet Experiences,” *Development Engineering* 8 (November 1, 2023), <https://doi.org/10.1016/j.deveng.2023.100107>.
- Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39, 191–205. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.04.004>
- Burton, E. (2019). Navigating global socialism: Tanzanian students in and beyond East Germany. *Cold War History*, 19(1), 63–83. <https://doi.org/10.1080/14682745.2018.1485146>
- Cobbinah, P. B., Asibey, M. O., & Gyedu-Pensang, Y. A. (2020). Urban land use planning in Ghana: Navigating complex coalescence of land ownership and administration. *Land Use Policy*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105054>

⁵⁶ Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39, 191–205. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.04.004>

⁵⁷ Cobbinah, P. B., Asibey, M. O., & Gyedu-Pensang, Y. A. (2020). Urban land use planning in Ghana: Navigating complex coalescence of land ownership and administration. *Land Use Policy*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105054>

- Corbelle-Rico, E., Sánchez-Fernández, P., López-Iglesias, E., Lago-Peñas, S., & Da-Rocha, J. M. (2022). Putting land to work: An evaluation of the economic effects of recultivating abandoned farmland. *Land Use Policy*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105808>
- David Burnes, Marguerite DeLiema, and Lynn Langton, “Risk and Protective Factors of Identity Theft Victimization in the United States,” *Preventive Medicine Reports* 17 (March 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101058>.
- de Zwart, P., & Soekhradj, P. (2023). Sweet equality: Sugar, property rights, and land distribution in colonial Java. *Explorations in Economic History*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2023.101513>
- Debonne, N., van Vliet, J., Metternicht, G., & Verburg, P. (2021). Agency shifts in agricultural land governance and their implications for land degradation neutrality. *Global Environmental Change*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102221>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Gaffar, S., Karsona, A. M., Pujiwati, Y., & Perwira, I. (2021). The concept of procedural law regarding the implementation of collective agreements with legal certainty in termination of employment in Indonesia. *Heliyon*, 7(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06690>
- Gallemore, C., Munroe, D., & van Berkel, D. (2018). Rural-to-urban migration and the geography of absentee non-industrial private forest ownership: A case from southeast Ohio. *Applied Geography*, 96, 141–152. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.05.010>
- Gobster, P. H., Rigolon, A., Hadavi, S., & Stewart, W. P. (2020). The condition-care scale: A practical approach to monitoring progress in vacant lot stewardship programs. *Landscape and Urban Planning*, 203. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103885>
- Hermann Kam et al., “Engaging Absentee Landholders in Ecosystem Service Delivery in South-Eastern Australia,” *Ecosystem Services* 39 (October 1, 2019), <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100988>.
- Long and Phillips.
- Jitao Wang et al., “ConGradetect: Blockchain-Based Detection of Code and Identity Privacy Vulnerabilities in Crowdsourcing,” *Journal of Systems Architecture* 114 (March 1, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2020.101910>.
- Joireman, S. F., & Tchatchoua-Djomo, R. (2023). Post-conflict restitution of customary land: Guidelines and trajectories of change. *World Development*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106272>
- Kit Yeng Long and Jenny O.L. Phillips, “The Transformation of Government Employees’ Behavioural Intention towards the Adoption of E-Government Services: An Empirical Study,” *Social Sciences and Humanities Open* 7, no. 1 (January 1, 2023), <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100485>.
- Korkea-aho, E., & Leino-Sandberg, P. (2022). Law, Legal Expertise and EU Policy-Making: Introduction. In *Law, Legal Expertise and EU Policy-Making* (pp. 1–16). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108909099.001>
- L. Genga, Nicola Zannone, and Anna Squicciarini, “Discovering Reliable Evidence of Data Misuse by Exploiting Rule Redundancy,” *Computers and Security* 87 (November 1, 2019), <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101577>.
- Lee, K. (2019). Absentee ownership, land taxation and surcharge. *Annals of Regional Science*, 62(1), 47–68. <https://doi.org/10.1007/s00168-018-0880-7>

- Li, Z., Follman, K., Freshwater, E., Engler, F., & Yel, L. (2022). Integrated population pharmacokinetics of immunoglobulin G following intravenous or subcutaneous administration of various immunoglobulin products in patients with primary immunodeficiencies. *International Immunopharmacology*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.109331>
- Liu, H., Soares-Filho, B. S., Leite-Filho, A. T., Zhang, S., Du, J., & Yi, Y. (2023). How to balance land demand conflicts to guarantee sustainable land development. *IScience*, 26(5). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106641>
- Liu, J., & Shi, W. (2021). A cross-boundary travel tale: Unraveling Hong Kong residents' mobility pattern in Shenzhen by using metro smart card data. *Applied Geography*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102416>
- Md Azmeary Ferdoush, "Flexible Land: The State and Its Citizens' Negotiation over Land Ownership," *Geoforum* 130 (March 1, 2022): 46–58, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.02.003>.
- Moreda, T. (2022). Beyond land rights registration: understanding the mundane elements of land conflict in Ethiopia. *Journal of Peasant Studies*. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2120813>
- Moreda, T. (2022). Beyond land rights registration: understanding the mundane elements of land conflict in Ethiopia. *Journal of Peasant Studies*. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2120813>
- Okembo, C., Lemmen, C., Kuria, D., & Zevenbergen, J. (2022). Developing an adapted land administration domain model profile for Kenya. *Land Use Policy*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106087>
- Olivero, M. A., Bertolino, A., Domínguez-Mayo, F. J., Escalona, M. J., & Matteucci, I. (2020). Digital persona portrayal: Identifying pluridentity vulnerabilities in digital life. *Journal of Information Security and Applications*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102492>
- Park, S., Akatyev, N., Jang, Y., Hwang, J., Kim, D., Yu, W., Shin, H., Han, C., & Kim, J. (2018). A comparative study on data protection legislations and government standards to implement digital forensic readiness as mandatory requirement. *DFRWS 2018 EU - Proceedings of the 5th Annual DFRWS Europe*, S93–S100. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2018.01.012>
- Parra, D., & Mauger, R. (2022). A new dawn for energy storage: An interdisciplinary legal and techno-economic analysis of the new EU legal framework. *Energy Policy*, 171. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113262>
- Pretty, J., Attwood, S., Bawden, R., van den Berg, H., Bharucha, Z. P., Dixon, J., Flora, C. B., Gallagher, K., Genskow, K., Hartley, S. E., Ketelaar, J. W., Kiara, J. K., Kumar, V., Lu, Y., MacMillan, T., Maréchal, A., Morales-Abubakar, A. L., Noble, A., Vara Prasad, P. V., ... Yang, P. (2020). Assessment of the growth in social groups for sustainable agriculture and land management. *Global Sustainability*, 3. <https://doi.org/10.1017/sus.2020.19>
- Rachana Rajan and Stephanie M. Topp, "Accountability Mechanisms of Inquiries and Investigations into Australian Governments' Responses to the COVID-19 Pandemic," *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 46, no. 4 (August 1, 2022): 488–94, <https://doi.org/10.1111/1753-6405.13258>.
- Rennuit-Mortensen, A. W., Dalgas Rasmussen, K., & Grahn, M. (2023). How replacing fossil fuels with electrofuels could influence the demand for renewable energy and land area. *Smart Energy*, 10, 100107. <https://doi.org/10.1016/j.segy.2023.100107>
- Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Subarudi, Alviya, I., & Muttaqin, M. Z. (2019). Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and

- climate change. *Forest Policy and Economics*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>
- Restrepo, G. U., Pritchard, B., & Welch, E. (2023). Does the extent of time in drought affect the rate of farm ownership change in a local government area? A sixteen-year assessment of rural land ownership change in New South Wales, Australia. *Journal of Rural Studies*, 98, 11–18. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.020>
- S. Krishnapriya and Greeshma Sarath, “Securing Land Registration Using Blockchain,” in *Procedia Computer Science*, vol. 171 (Elsevier B.V., 2020), 1708–15, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.183>.
- Sorice, M. G., Rajala, K., & Kreuter, U. P. (2018). Understanding Management Decisions of Absentee Landowners: More Than Just Presence-Absence. *Rangeland Ecology and Management*, 71(2), 159–162. <https://doi.org/10.1016/j.rama.2017.12.002>
- Stephanie A. Snyder et al., “Relationships between Absenteeism, Conservation Group Membership, and Land Management among Family Forest Owners,” *Land Use Policy* 91 (February 1, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104407>.
- Stephen Mollidrem, Mustafa I. Hussain, and Alexander McClelland, “Alternatives to Sharing COVID-19 Data with Law Enforcement: Recommendations for Stakeholders,” *Health Policy* 125, no. 2 (February 1, 2021): 135–40, <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.10.015>.
- Studzinska, J. (2022). Request for information as an auxiliary measure in intellectual property litigation concerning electronic works and the protection of personal data. *Procedia Computer Science*, 207, 4276–4287. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.491>
- Sunjo, E., & Page, B. (2022). Land Restitution and Conflict in Cameroon: The case of the Bakweri. *African Affairs*, 121(485), 623–648. <https://doi.org/10.1093/afraf/adac034>
- Trias Aditya et al., “Validation and Collaborative Mapping to Accelerate Quality Assurance of Land Registration,” *Land Use Policy* 109 (October 1, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689>.
- Upadhyay, C. (2021). Recasting Land: Agrarian Urbanism in Amaravati. *Urbanisation*, 6(1), 82–103. <https://doi.org/10.1177/24557471211018304>
- van Oosterom, P., Unger, E. M., & Lemmen, C. (2022). The second themed article collection on the land administration domain model (LADM). *Land Use Policy*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106287>
- Xu, Z., Luo, M., Peng, C., & Feng, Q. (2023). Sanitizable signature scheme with privacy protection for electronic medical data sharing. *Cyber Security and Applications*, 1, 100018. <https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100018>
- Yan, J., Van Son, R., & Soon, K. H. (2021). From underground utility survey to land administration: An underground utility 3D data model. *Land Use Policy*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105267>
- Yuanxin Li and Darina Saxunová, “A Perspective on Categorizing Personal and Sensitive Data and the Analysis of Practical Protection Regulations,” in *Procedia Computer Science*, vol. 170 (Elsevier B.V., 2020), 1110–15, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.060>.
- Zhiyan Xu et al., “Sanitizable Signature Scheme with Privacy Protection for Electronic Medical Data Sharing,” *Cyber Security and Applications* 1 (December 2023): 100018, <https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100018>.